



Pajak Kuat,  
Indonesia Maju

# LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2024

**KPP PRATAMA  
MEDAN BELAWAN**

## **KATA PENGANTAR**

Setiap organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan efisien dan efektif. Pencapaian tujuan tersebut, dapat dilakukan karena ada berbagai sumber daya yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sumber yang mengendalikan organisasi serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk media pertanggungjawaban secara kelembagaan. Dengan demikian diharapkan akan tercipta pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam setiap pencapaian tujuan, setiap sumber daya manusia melakukan tugas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan suatu perwujudan kewajiban sebagai salah satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

KPP Pratama Medan Belawan mengacu pada Rencana Strategis DJP 2020-2024 dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai serta menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai tugas utama, yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) untuk periode 2020-2024 berupa rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2024, yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja, indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berhasil mencapai 107.99%. Nilai tersebut berasal dari indeks capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* sebesar 100.21%,

*Customers Perspective* sebesar 100.77%, *Internal Process Perspective* sebesar 116.25% dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 114.87%.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2024.

Medan, 23 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Mujtahid



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan negara dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini menjadi gambaran sasaran KPP Pratama Medan Belawan untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1,127,804,086,000.- dengan realisasi sebesar Rp 1,128,640,732,284.- atau dengan indeks capaian sebesar 100.07%. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Secara keseluruhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Medan Belawan tercapai dengan baik, terbukti dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107,99% dimana sebanyak 20 (dua puluh) IKU berstatus hijau. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu- Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b><i>Stakeholder Perspective</i></b>				100,21
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,41	100,41
<b><i>Customer Perspective</i></b>				100,77
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,92

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,14%	102,14
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,61
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,61%	100,61
<b>Internal Process Perspective</b>				116,25
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,03
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,05%	110,05
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,54%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115,18
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,63%	115,63
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,85%	119,85
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,07%	110,07
7	Penegakan hukum yang efektif			111,04
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,85%	119,85
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,70%	115,60
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				114,87
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			109,73

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,18	117,18
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,83	102,16
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,88	109,86
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>107,99</b>

Namun demikian untuk kedepannya tetap berupaya lebih meningkatkan kinerja. Sebagai bentuk evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Sarana dan prasarana yang perlu ditambah dan diperbaiki secara kuantitatif dan kualitatif;
- Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- Peningkatan kemajuan teknologi informasi;
- Peningkatan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kompetitif.

Beberapa kendala di atas dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam melakukan pembenahan secara keseluruhan, beberapa pembenahan tersebut antara lain:

- Pada saat penentuan target penerimaan pajak agar memperhitungkan *potensial loss* yang akan terjadi pada tahun yang bersangkutan dan tingkat perkembangan ekonomi wilayah;
- Melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana secara kuantitatif dan kualitatif;
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui penyuluhan, himbauan, dan pelayanan prima yang lebih baik;
- Peningkatan kemajuan teknologi informasi melalui pembenahan sistem informasi dan infrastrukturnya serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten dan kompetitif melalui kegiatan *In House Training*, *E-Learning*, *Internal Corporate Value*, dan diklat.

Pencapaian kinerja bukanlah suatu angka untuk berpuas diri tetapi menjadi bahan kajian dan analisis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk melakukan pembenahan dan koreksi dalam melaksanakan perubahan menuju yang lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	8
B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	16
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	80
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan suatu perwujudan kewajiban sebagai salah satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya good governance.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1,127,804,086,000.- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP-232/WPJ.01/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-144/WPJ.01/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-56/WPJ.01/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Medan Belawan yang digambarkan dari hasil nilai kinerja organisasi. Adapun tantangan strategis yang kerap kali dihadapi, seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, Implementasi CORETAX, fluktuasi perekonomian, dan lain sebagainya. Atas dasar dan permasalahan tersebut, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan perencanaan yang mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa

mendatang.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

### **1. Tugas**

KPP Pratama Medan Belawan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- d. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan;

- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

#### a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

#### b) Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

#### c) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

#### d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

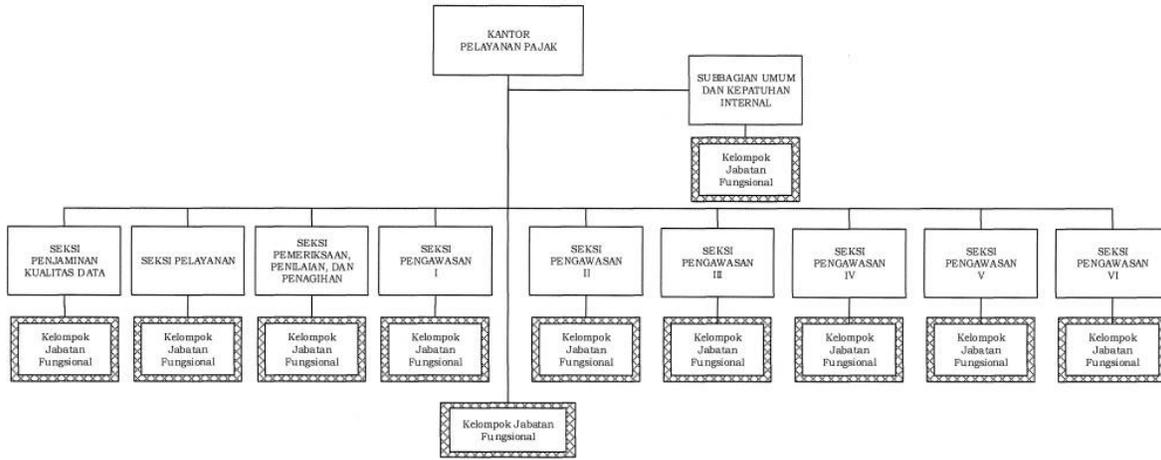
e) Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

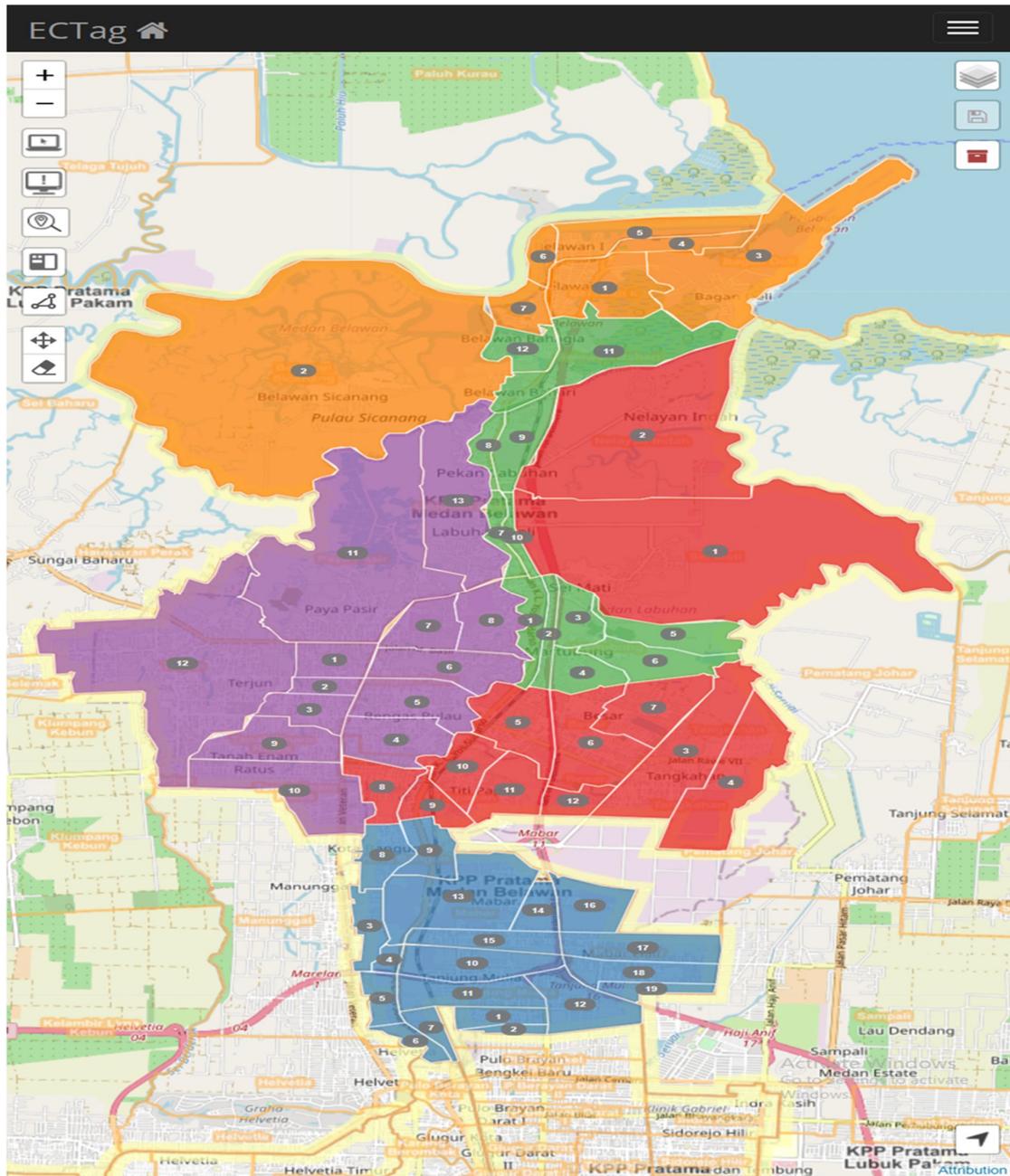
**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)**



Lokasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu :

NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULYA
			TITIPAPAN
			TANJUNG MULIA HILIR
			MABAR
			KOTA BANGUN
			MABAR HILIR
		MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU
			TANAH ENAM RATUS
			TERJUN
			PAYA PASIR
		MEDAN LABUHAN	LABUHAN DELI
			MARTUBUNG
			BESAR
			PEKAN LABUHAN
			TANGKAHAN
		MEDAN BELAWAN	SEI MATI
			NELAYAN INDAH
			BELAWAN I
			BELAWAN II
			BAGAN DELI
			BELAWAN BAHAGIA
BELAWAN SICANANG			
BELAWAN BAHARI			

# Peta Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 90 (sembilan puluh) pegawai yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis jabatan, antara lain :

<b>Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Berdasarkan Jabatan</b>		
<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1.	Kepala Kantor	1 pegawai
2.	Kepala Seksi / Subbagian	10 pegawai
3.	Account Representative	35 pegawai
4.	Fungsional Pemeriksa	7 pegawai
5.	Fungsional Penyuluh	5 pegawai
6.	Fungsional Penilai	1 pegawai
7.	Pelaksana	31 pegawai
Jumlah		90 pegawai

### **C. Sistematika Pelaporan**

Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2024 sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif  
merupakan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja
- Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dan dapat diuraikan menjadi beberapa subbab seperti latar belakang; tugas, fungsi dan struktur organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), serta ringkasan/ikhtisar penyusunan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
  - B. Realisasi Anggaran  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
  - C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh

organisasi pada tahun 2024

#### D. Kinerja Lain-Lain

#### E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

- Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran: Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024. Rencana strategis yang dimaksud ialah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

- Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dan yang menjadi misi KPP Pratama Medan Belawan yaitu 'Menghimpun penerimaan Negara melalui pajak dan memberikan layanan perpajakan terbaik yang memudahkan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela'.

Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perwujudan visi dan misi adalah dengan merumuskan serangkaian kebijaksanaan, menyusun program dan merealisasikan kegiatan-kegiatan. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Perjanjian Kinerja (PK) digunakan sebagai dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Sasaran Strategis yang akan dicapai dipandang dari segi *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, serta *Learning and Growth Perspective* dengan rincian sebagai berikut:

1) *Stakeholder Perspective* meliputi :

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dapat dilihat melalui persentase realisasi penerimaan pajak, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

2) *Customer Perspective* meliputi :

a. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

b. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Tingkat kepatuhan sebelumnya yang tinggi dapat dilihat dari Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

3) *Internal Process Perspective* meliputi :

a) Edukasi dan pelayanan yang efektif, yaitu:

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Meningkatkan pelayanan yang dapat dilihat dari indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

b) Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif, yaitu :

- Tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak dilihat dari persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif

c) Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif, yaitu :

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela, dapat dilihat dari : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dan efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

d) Penegakan hukum yang efektif, yaitu :

- Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang dapat di lihat dari tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
- Meningkatkan efektivitas penagihan yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas penagihan;
- Meningkatkan persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

e) Data dan Informasi yang berkualitas, yaitu :

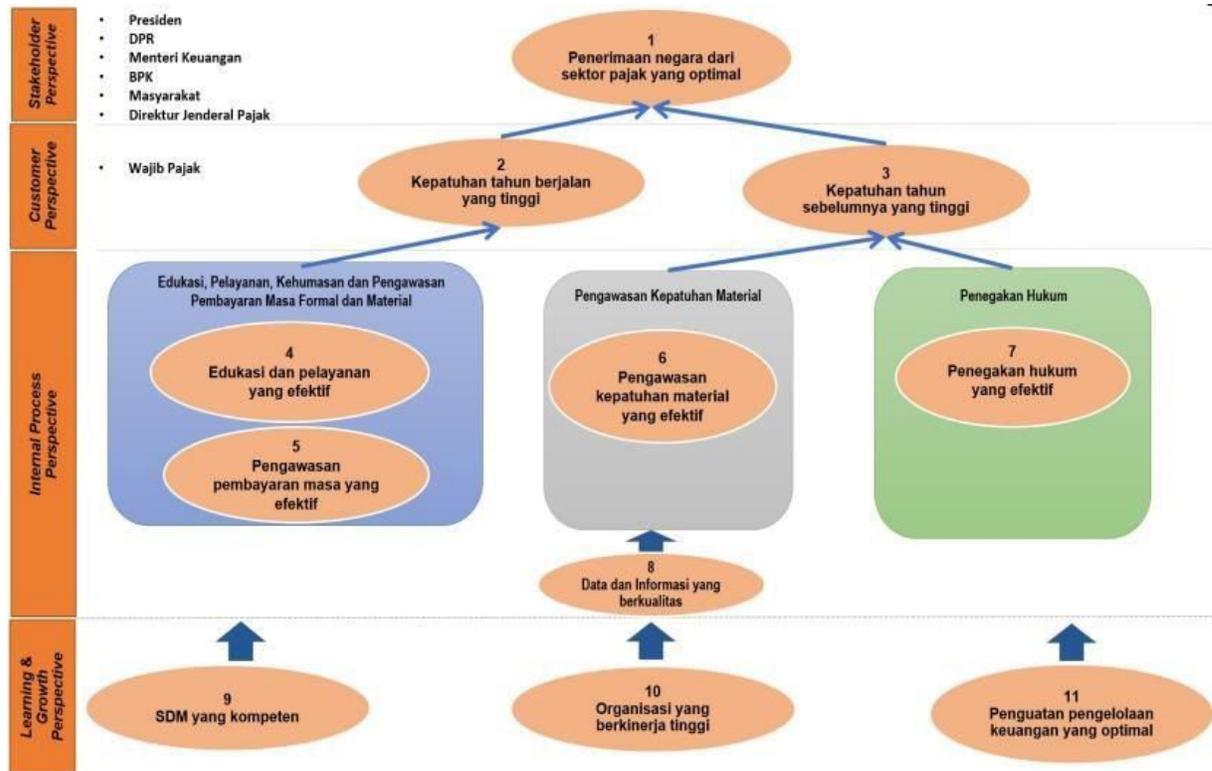
- Data, informasi dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mengambil keputusan dapat dilihat dari Presentase penyelesaian laporan pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan;
- Data dan Informasi yang berkualitas dilihat dari persentase penghimpunan data regional dari ILAP

4. *Learning and Growth Perspective* meliputi :

a) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dilihat dari tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit dan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;

b) Pengelolaan keuangan yang akuntabel meliputi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Tujuan strategis dipetakan dalam peta strategi. Keempat ukuran tersebut (*Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*) kemudian diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU). Adapun peta strategi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:



Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun Capaian Kinerja Organisasi pada tahun 2024 sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel Nilai Kinerja Organisasi berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
KPP KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2024**

Kode ss/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>100,21</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,41	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,41
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>100,77</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,14%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,14
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,61
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,61%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,61
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>115,26</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,03
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,05%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,05
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,54%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,18
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,63%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,63
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,85%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,85
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,07%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,07
7	Penegakan hukum yang efektif							111,04
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,85%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,85
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	115,60
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>114,87</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,73
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebibliaan SDM	100,00	117,18	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,18
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,83	Max	P/M	14,00%	33,33%	102,16
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,88	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,86
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>107,89</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Capaian tiap IKU dijelaskan sebagai berikut:

### **IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,30%	48,50%	48,50%	68,77%	68,77%	100,07%	100,07%
Capaian	101,32%	97,00%	97,00%	91,69%	91,69%	100,07%	100,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui Penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundangundangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	X 100%
Target Penerimaan Pajak	

d) Realisasi IKU

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc 2023	% Penc 2024
A	PPH Non Migas	713,50	583,48	768,58	-1,89%	31,72%	99,87%	107,72%
B	PPN dan PPhBM	413,63	408,30	359,34	12,46%	-11,99%	109,66%	86,87%
C	PBB	0,27	0,28	0,29	773,17%	4,66%	138,69%	109,38%
D	Pajak Lainnya	0,41	0,33	0,43	57,47%	27,67%	101,62%	104,83%
E	PPH Migas	-	-	-	-	-	-	-
Total Non PPh Migas		1.127,80	992,40	1.128,64	3,26%	13,59%	103,76%	100,07%
Total termasuk PPh Migas		1.127,80	992,40	1.128,64	3,26%	13,59%	103,76%	100,07%

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.128.640.732.284,- dengan capaian sebesar 100.07% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Perubahan Ketiga 23 Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM Per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024. Realisasi ini tumbuh sebesar 13,59% dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	95,56%	117,58%	125,30%	103,76%	100,07%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi perlambatan perekonomian, khususnya atas barang komoditi sehingga setoran pajak Wajib Pajak menjadi menurun, khususnya untuk pasal 21 dan PPN dan terdapat reorganisasi atau perubahan struktur pada Wajib Pajak pusat yang berakibat pada beberapa Wajib Pajak cabang di KPP menjadi berkurang

atau nihil. Adapun upaya sudah dilakukan dengan mencoba melakukan penggalan potensi melalui sumber potensi lainnya, namun masih belum dapat menutupi kekurangan tersebut.

- Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,07%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,07%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

- Melakukan pengawasan masa atas tahun berjalan serta penggalan potensi atas data pemicu atau analisis mandiri untuk tahun pajak di luar tahun berjalan;
- Menerbitkan surat himbauan (SP2DK dan Imbauan) baik atas tahun pajak berjalan maupun di luar tahun pajak berjalan dan mengusulkan pemeriksaan atas SP2DK yang tidak direspon oleh WP;
- Menerbitkan Surat Teguran atas SPT yang belum dilaporkan oleh WP;
- Menerbitkan STP atas tahun pajak berjalan dan tahun pajak sebelumnya;
- Meneliti seluruh kewajiban perpajakan atas WP yang mengajukan permohonan PKP atau SKB;
- Menerbitkan suspend dan pencabutan PKP atas PKP yang tidak patuh.

- Rencana aksi tahun selanjutnya

Adapun rencana aksi selanjutnya yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu:

- Memastikan Pembayaran Masa Wajib Pajak patuh dan tepat waktu;
- Menindaklanjuti setiap Daftar nominatif STP yang ada sistem atau aplikasi;
- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji tahun berjalan;
- Meneliti wp yang secara omzet naik signifikan untuk dihimbau untuk melakukan dinamisasi PPh psl 25;

5. Melakukan visit terhadap wp yang tidak merespon SP2DK;
6. Melakukan validasi Master File WP;
7. Melibatkan pihak Kelurahan/Kepala lingkungan untuk mengetahui keberadaan WP;
8. Meningkatkan kegiatan penyuluhan WP khususnya atas WP baru terdaftar;
9. Melanjutkan pengawasan kepatuhan formal dan material pelaporan SPT WP baik atas tahun pajak berjalan.

### **IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (1b-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	96,03	102,67	102,67	99,85	99,85	100,41	100,41
Capaian	96,03	102,67	102,67	99,85	99,85	100,41	100,41

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

(1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta

(2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi 30 penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun

berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ . Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c) Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

d) Realisasi IKU

**Dashboard** Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

**Data Realisasi Penerimaan**  
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
020 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	34.271.840.788.390	34.180.237.302.711	0.27%	100.27%	95.48%	97.40%
112 - PRATAMA MEDAN BELAWAN	1.145.570.088.882	1.004.098.028.245	14.09%	114.09%	108.64%	110.82%

**Dashboard Deviasi 2024**

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas  
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 08-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bin 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
020 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	26.149.875.951.960	27.256.986.295.584	5,99%	3,66%	6,56%	11,21%	2,54%	5,99%	100,00%
112 - PRATAMA.MEDAN.BELAWAN	1.060.074.138.964	1.128.640.732.284	9,84%	9,92%	13,23%	8,49%	7,72%	9,84%	90,00%

Sumber: Mandor

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100,41%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	54,95%	99,36%	120%		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				118,26	100,41

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	100,41

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	100,41

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Menyusun proyeksi perencanaan kas dengan melibatkan *Account Representative*;
2. Melakukan analisa perhitungan penerimaan rutin dan non rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Adapun rencana aksi selanjutnya yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu menyusun proyeksi perencanaan kas dengan melibatkan *Account Representative*.

**IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (2a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,32%	45,79%	45,79%	67,39%	67,39%	100,04%	100,04%
Capaian	105,74%	91,59%	91,59%	89,85%	89,85%	100,04%	100,04%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d) Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

---

**Data Penerimaan PPM PKM**  
Per Unit Kerja

2024
Januari
Desember
Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
<span style="color: red;">-</span> 020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I <a href="#">112 - PRATAMA MEDAN BELAWAN</a>	25.140.419.041.000	25.188.065.692.910	100.19%	100.00%	100.19%
	1.066.609.175.000	1.067.073.810.044	100.04%	100.00%	100.04%

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	-	123,08%	132,16%	107,62%	100,04%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100%	100%	100,04%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100%	-	100,04%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Melakukan pengawasan masa atas tahun berjalan serta menindaklanjuti data pemicu atas tahun berjalan;
2. Menerbitkan surat himbauan (SP2DK dan Imbauan) atas tahun pajak berjalan;
3. Menerbitkan Surat Teguran atas SPT yang belum dilaporkan oleh WP;
4. Menerbitkan STP atas tahun pajak berjalan;
5. Meneliti seluruh kewajiban perpajakan atas WP yang mengajukan permohonan PKP atau SKB;

6. Melakukan penyisiran dan pengamatan untuk menambah WP terdaftar atas pelaku ekonomi yang sudah memenuhi persyaratan objektif menjadi WP.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan validasi Master File WP;
2. Melibatkan pihak Kelurahan/Kepala lingkungan untuk mengetahui keberadaan WP;
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pengawasan pembayaran WP khususnya atas WP baru terdaftar;
4. Melanjutkan pengawasan kepatuhan formal dan material pelaporan SPT WP baik atas tahun pajak berjalan.

**IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	85,41%	104,94%	104,94%	100,61%	100,61%	102,14%	102,14%
Capaian	120%	120%	120%	111,79%	111,79%	102,14%	102,14%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023

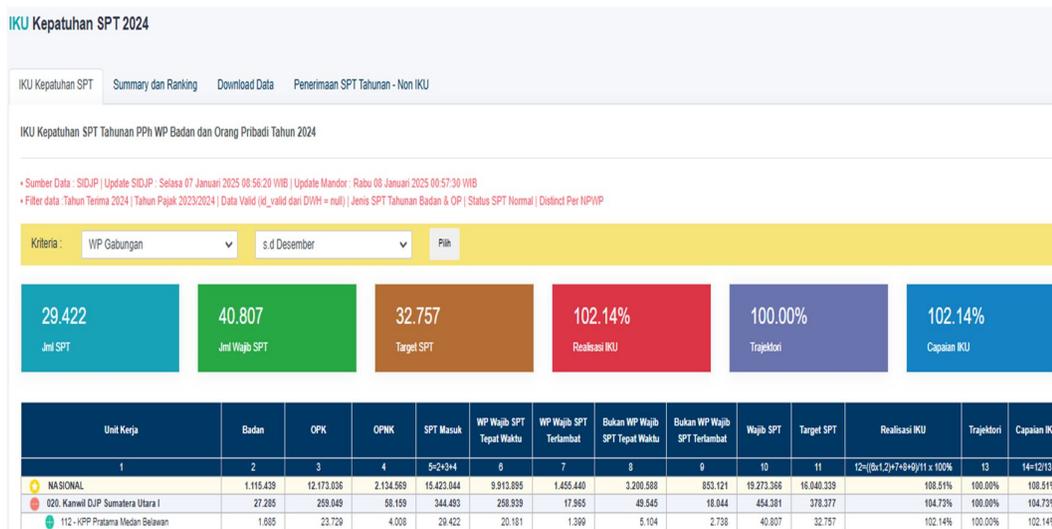
yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

#### d) Realisasi IKU



Sumber: Mandor

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	56,23%	101,88%	100,72%	103,33%	102,14%

#### 3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	102,14%

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	102,14%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Melakukan whatsapp blast untuk mengingatkan Wajib Pajak melaporkan SPT tepat Waktu;
2. Melakukan Layanan Diluar Kantor (LDK) dan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak melalui pemberi kerja;
3. Mengadakan sosialisasi secara daring melalui media sosial.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Untuk mengatasi antrian yang mengular di KPP, KPP Melakukan Layanan Diluar Kantor (LDK) dan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak melalui pemberi kerja;
2. Menyediakan layanan baik online ataupun offline untuk mengatasi ketidakpahaman WP terhadap pelaporan SPT Tahunan;
3. Mengadakan sosialisasi secara daring melalui media sosial;
4. Mengingatkan WP lebih awal untuk melaporkan SPT Tahunan melalui WA blast, spanduk dll

**IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	9,06%	85,42%	85,42%	86,49%	86,49%	100,61%	100,61%
Capaian	36,26%	120%	120%	115,32%	115,32%	100,61%	100,61%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d) Realisasi IKU

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

**Data Penerimaan PPM PKM**  
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember

	PKM				
U %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
3%	2.059.634.741.000	2.068.920.042.764	100.45%	100.00%	100.45%
1%	61.194.911.000	61.566.922.240	100.61%	100.00%	100.61%

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	54,93%	100,61%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,61%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,61%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Menerbitkan surat himbauan (SP2DK dan Imbauan) atas potensi di luar tahun pajak berjalan baik melalui DPP kolaboratif maupun mandatori;
2. Menerbitkan Surat Teguran atas SPT yang belum dilaporkan oleh WP;
3. Menerbitkan STP di luar tahun pajak berjalan;
4. Meneliti seluruh kewajiban perpajakan atas WP yang mengajukan permohonan PKP atau SKB;
5. Menerbitkan suspend dan pencabutan PKP atas PKP yang tidak patuh;
6. Mengusulkan pemeriksaan atas SP2DK yang tidak direspon oleh WP;
7. Melakukan penagihan aktif atas WP yang menunggak pembayaran SKP.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya
  1. Melakukan validasi Master File WP;
  2. Melibatkan pihak Kelurahan/Kepala lingkungan untuk mengetahui keberadaan WP;
  3. Mengadakan IHT/Bimbingan Teknis yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
  4. Melanjutkan penggalan potensi material di luar tahun pajak berjalan;
  5. Melanjutkan kegiatan penagihan aktif;
  6. Mempercepat proses pemeriksaan agar terdapat ruang terbit atas usulan pemeriksaan yang baru.

**IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	26,5%	67,34%	67,34%	85,56%	85,56%	88,8%	88,8%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

### 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan Batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

#### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

#### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c) Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d) Realisasi IKU

Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	PRATAMA MEDAN BELAWAN	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	118,18 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
4103150000	KPP Pratama Medan Belawan	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	118,18 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

4103150000 - KPP Pratama Medan Belawan

Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU					
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajektori	Realisasi			
Tema1	4	4	4		Bayar	110	130	118,18%	100,00%	18,50%	Q1	10,00%	120,00%	
Tema2	16	34	16		Lapor	110	432	392,73%	Perubahan Perilaku		Q2	40,00%	120,00%	
Tema3									Bayar	118,18%	42,18%	Q3	60,00%	120,00%
One to One	10	82	10		Σ Nominal Bayar			Lapor	392,73%	28,12%	Q4	74,00%	120,00%	
One to Many	10	18	10		911,065,317,00			Total		88,80%				
Total	40	138	40	100,00%										

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88,80%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Penyuluh harus visit dan melakukan tinjauan lapangan;
2. Penyuluh melakukan Analisis terhadap Profil WP;
3. Membuat daftar prioritas, dimana untuk penyelesaian DSPT;
4. Membuat Berita Acara WP tidak ditemukan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Penyuluh harus visit dan melakukan tinjauan lapangan;
2. Penyuluh melakukan Analisis terhadap Profil WP;
3. Membuat daftar prioritas, dimana untuk penyelesaian DSPT;
4. Membuat Berita Acara WP tidak ditemukan.

**IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,2%	6,3%	6,3%	6%	18%	92,05%	110,05%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110,05%	110,05%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survey terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

d) Realisasi IKU

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I		92.75	88.51	87.74		89.67		92.95	110.95
332	KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	92.62	84.97		88.80		92.05	110.05	
333	KPP PRATAMA BINJAI	94.99	85.99		90.49		93.80	111.80	
334	KPP MADYA MEDAN	87.65	85.58		86.61		89.78	107.78	
335	KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	93.81	88.50		91.15		94.49	112.49	
336	KPP PRATAMA MEDAN BARAT	88.19	84.70		86.44		89.61	107.61	
337	KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	91.12	87.07		89.10		92.36	110.36	
338	KPP MADYA DUA MEDAN	96.73	94.27		95.50		98.99	116.99	
339	KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	94.25	88.11		91.18		94.51	112.46	
340	KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	89.45	85.42		87.43		90.63	108.63	

Sumber: Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	110,05%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	82%	100%	110,05%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	110,05%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Melakukan asistensi pengisian survei hingga proses submit;
2. Melakukan asistensi kepada WP agar dapat menggunakan Google Lens;
3. Meletakkan QR/Barcode di meja Helpdesk sehingga WP dapat scan secara mandiri dan

meletakkan QR/Barcode di meja pengarah layanan (Satpam) sehingga dapat dilakukan asistensi oleh petugas pengarah layanan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan asistensi pengisian survei hingga proses submit;
2. Melakukan asistensi kepada WP agar dapat menggunakan Google Lens;
3. Meletakkan QR/Barcode di meja Helpdesk sehingga WP dapat scan secara mandiri dan meletakkan QR/Barcode di meja pengarah layanan (Satpam) sehingga dapat dilakukan asistensi oleh petugas pengarah layanan.

**IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (5a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	77,23%	118,43%	118,43%	116,1%	116,1%	116,54%	116,54%
Capaian	85,81%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Optimalisasi "Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.

d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian

kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

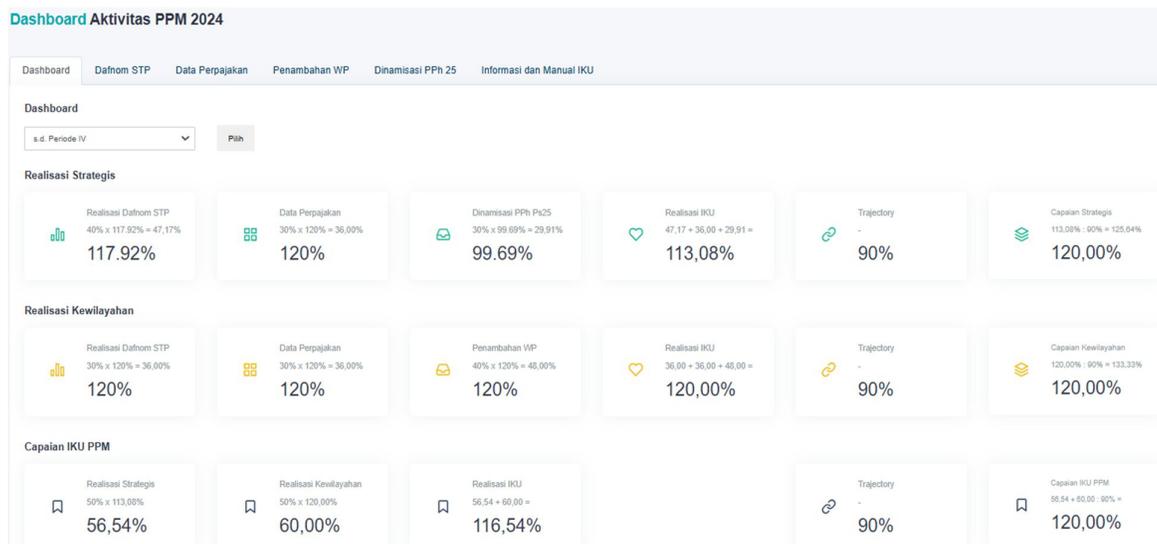
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang

Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian.

c) Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})}{100\%}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

d) Realisasi IKU



Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	95,91%	103,73%	111,47%	116,54%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	90%	90%	116,54%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	116,54%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Melakukan pengawasan WP setelah assignment wilayah selesai;
2. Menerbitkan SP2DKE atas DSPE dan menyelesaikan SP2DKE outstanding;
3. Menerbitkan STP atas dafnom STP dan di luar dafnom yang berpotensi untuk di-STP;
4. Melakukan penelitian atas data pemicu, data konkret dan data penguji untuk diusulkan dalam DPP mandatori dan selanjutnya menerbitkan LHPT.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Segera menindaklanjuti penerbitan STP atas dafnom STP pada approweb;
2. Segera menerbitkan SP2DKE atas data DSPE dan data KPDL;
3. Melakukan kerja sama dengan Kelurahan dan Kepala Lingkungan untuk dapat menemukan alamat WP;

4. Melakukan penelitian atas data pemicu dan data konkret yang ada di approweb;
5. Membuat pengawasan IKU manual.

### **IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (6a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	79,57%	110,23%	110,23%	103,79%	103,79%	115,63%	115,63%
Capaian	85,81%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak

Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

b. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE- 05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berdasarkan Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

c. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

d. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

c) Formula IKU

((50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)).

d) Realisasi IKU

**IKU P4DK Strategis 2024**

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 Tanggal Perkiraan Data (ETL): 06 Januari 2025, 22:01 WIB  
Tanggal Proses Data (DWI): 07 Januari 2025, 16:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHPZDK	Jumlah Bobot LHPZDK atas DPP 2024	LHPZDK dari SPZDK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHPZDK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
020. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	2.242,00	3.643,50	120,00%	2.242,00	2.835,05	692	540,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
111 PRATAMA MEDAN BARAT	176,00	281,80	120,00%	176,00	190,50	44	36,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
112 PRATAMA MEDAN BELAWAN	154,00	198,60	120,00%	154,00	162,35	0	0,00	105,42%	111,25%	100%	111,25%
113 PRATAMA MEDAN TIMUR	132,00	191,00	120,00%	132,00	128,50	96	51,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
119 PRATAMA BINJAI	132,00	225,60	120,00%	132,00	130,85	62	35,15	120,00%	120,00%	100%	120,00%
121 PRATAMA MEDAN POLONIA	132,00	184,00	120,00%	132,00	141,20	25	20,15	120,00%	120,00%	100%	120,00%
123 MADYA MEDAN	600,00	945,50	120,00%	600,00	749,60	177	152,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
124 PRATAMA MEDAN PETISAH	132,00	213,80	120,00%	132,00	128,10	53	42,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
125 PRATAMA LUBUK PAKAM	154,00	283,60	120,00%	154,00	189,55	46	33,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
129 MADYA DUA MEDAN	630,00	1.119,60	120,00%	630,00	1.017,40	189	168,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.120,55	16.837	12.383,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%

**IKU P4DK Kewilayahan 2024**

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 Tanggal Perkiraan Data (ETL): 06 Januari 2025, 22:01 WIB  
Tanggal Proses Data (DWI): 07 Januari 2025, 16:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHPZDK dari DPP (50%)			LHPZDK dari SPZDK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHPZDK	Jumlah Bobot LHPZDK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SPZDK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
020. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	6.818,50	7.670,20	112,49%	1.262,30	2.529,40	200,38%	120,00%	8.080,80	9.930,70	122,89%	121,74%	100%	120,00%
111 PRATAMA MEDAN BARAT	1.545,05	1.901,40	123,06%	294,30	614,00	276,08%	120,00%	1.839,35	2.242,10	121,90%	121,14%	100%	120,00%
112 PRATAMA MEDAN BELAWAN	587,60	741,60	126,21%	42,80	90,60	211,68%	120,00%	630,40	810,20	128,52%	125,11%	100%	120,00%
113 PRATAMA MEDAN TIMUR	896,35	961,00	107,30%	225,90	237,20	105,00%	106,15%	1.122,25	1.265,95	112,80%	110,14%	100%	110,14%
119 PRATAMA BINJAI	622,70	554,60	89,06%	103,00	146,60	142,33%	115,70%	725,70	713,55	98,33%	105,27%	100%	105,27%
121 PRATAMA MEDAN POLONIA	1.152,45	1.152,40	100,00%	275,40	480,60	174,51%	120,00%	1.427,05	1.676,15	117,39%	118,43%	100%	118,43%
124 PRATAMA MEDAN PETISAH	902,85	977,80	108,30%	190,40	379,20	199,16%	120,00%	1.093,25	1.423,20	130,18%	126,11%	100%	120,00%
125 PRATAMA LUBUK PAKAM	1.111,50	1.440,60	129,61%	130,50	380,40	291,49%	120,00%	1.242,00	1.799,55	144,89%	134,93%	100%	120,00%
NASIONAL	177.071,70	220.952,80	124,78%	22.926,50	46.474,00	202,71%	120,00%	199.998,20	258.359,90	129,68%	125,81%	100%	120,00%

**Ranking KPP**

322	112-PRATAMA MEDAN BELAWAN	111,25 %	120,00 %	115,63 %
-----	---------------------------	----------	----------	----------

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	92%	95,91%	118,68%	120%	115,63%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	115,63%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	115,63%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Melakukan penelitian atas DPP kolaboratif dan mengusulkan DPP mandatori;
2. Menerbitkan SP2DK dan menindaklanjuti dengan melakukan visit atas SP2DK yang belum direspon WP;
3. Menindaklanjuti data DPP outstanding dan menerbitkan LHP2DK;
4. Mengusulkan pemeriksaan atas SP2DK yang tidak direspon WP.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan kerja sama dengan Kelurahan dan Kepala Lingkungan untuk dapat

- menemukan alamat WP;
2. Melakukan penelitian atas data pemicu dan data penguji yang ada di approweb untuk pengusulan DPP mandatori;
  3. Mempercepat penerbitan SP2DK atas DPP 2025;
  4. Membuat pengawasan IKU manual;
  5. Mempercepat penyelesaian SP2DK outstanding.

### **IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan (6b-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	84,84%	116,73%	116,73%	117,44%	117,44%	119,85%	119,85%
Capaian	84,84%	116,73%	116,73%	117,44%	117,44%	119,85%	119,85%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- b) Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas

Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

#### - Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu

dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c) Formula IKU

<b>Formula</b>
<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

d) Realisasi IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode IV   Data update terakhir:  
Data STP 07-01-2025 00.00.00 WIB    Data Matching 31-12-2024 22.37.00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data	
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi				Persentase Data Matching %
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP	Ditindaklanjuti		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+h)/2	
020 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	19.878	19.878	23.765	11.000	34.242	158.370.980.637	120,00%	19.649	15.594	2.399	17.682	118,55%	119,28%	
112 - PRATAMA MEDAN BELAWAN	1.099	1.099	1.371	792	1.997	2.569.930.859	120,00%	938	735	144	886	119,70%	119,85%	
SEKSI PENGAWASAN I	405	405	447	37	404	1.504.873.398	119,51%	287	227	33	255	120,00%	119,76%	
SEKSI PENGAWASAN II	170	170	231	120	351	242.281.159	120,00%	104	80	22	109	118,86%	119,43%	
SEKSI PENGAWASAN III	203	203	281	69	350	395.007.633	120,00%	213	169	40	194	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN IV	50	50	76	173	249	69.537.506	120,00%	91	70	17	78	119,08%	119,54%	
SEKSI PENGAWASAN V	199	199	247	288	369	225.046.124	120,00%	166	131	24	155	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN VI	72	72	89	105	194	53.185.039	120,00%	75	58	8	95	120,00%	120,00%	

Ranking KPP

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	129. MADYA DUA MEDAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
2	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	120,00 %	119,70 %	119,85 %
3	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	120,00 %	119,52 %	119,76 %
4	123. MADYA MEDAN	120,00 %	119,38 %	119,69 %
5	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	120,00 %	118,72 %	119,36 %
6	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	120,00 %	118,63 %	119,32 %
7	119. PRATAMA BINJAI	120,00 %	118,12 %	119,06 %
8	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	120,00 %	116,80 %	118,40 %
9	111. PRATAMA MEDAN BARAT	120,00 %	116,06 %	118,03 %

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,85%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119,85%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	119,85%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Menerbitkan STP atas dafnom STP dan di luar dafnom yang berpotensi untuk di-STP;
2. Melakukan penelitian atas data pemicu, data konkret dan data penguji untuk diusulkan dalam DPP mandatori dan selanjutnya menerbitkan LHPt.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menerbitkan STP atas dafnom STP dan diluar dafnom yang berpotensi untuk di-STP;
2. Melakukan penelitian atas data pemicu dan data konkret yang ada di approweb untuk pengusulan DPP mandatori atau untuk diusulkan di-drop dari data pemicu;
3. Membuat pengawasan IKU manual;
4. Melakukan kerja sama dengan Kelurahan dan Kepala Lingkungan untuk dapat menemukan alamat WP;
5. Permintaan bantuan intelijen dalam hal potensi pajaknya cukup signifikan.

## **IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (6c-N)**

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,36%	95,56%	95,56%	99,18%	99,18%	110,07%	110,07%
Capaian	87,36%	95,56%	95,56%	99,18%	99,18%	110,07%	110,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

#### a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

##### - Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

##### - Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

##### - Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib

Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c) Formula IKU

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

d) Realisasi IKU

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)			
POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI		REALISASI	TARGET	CAPAIAN					
				PENGAWAS	EMERIKSA	PENAGIHA							
4,60	115,00%	100,00%	115,00%	87,23%	75,82%	74,37%	79,14%	80,00%	98,92%	79,13%	55,00%	120,00%	110,07%

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	110,07%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	110,07%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	110,07%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin bersama seluruh anggota komite.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin bersama seluruh anggota komite;
2. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait secara lebih intensif.

**IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72%	118,58%	118,58%	99,18%	119,22%	119,85%	119,85%
Capaian	72%	118,58%	118,58%	99,18%	119,22%	119,85%	119,85%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c) Formula IKU

$$\begin{array}{c} \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ + \\ \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{array}$$

d) Realisasi IKU

No.	Keterangan	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	109,24%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80%
c.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%)</b> <b>(c = a : b)</b>	120,00%
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	119,62%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%
f.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%)</b> <b>(f = d : e)</b>	119,62%
g.	<b>Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b> = 60% x capaian komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x capaian komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	119,85%
h.	<b>Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>	100,00%
i.	<b>Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (maksimal 120%)</b> <b>(i = g : h)</b>	<b>119,85%</b>

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	119,85%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	119,85%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	119,85%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu memperhatikan dasar temuan dan kemampuan bayar Wajib Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Pembuatan KKA untuk WP yang potensial untuk diusulkan pemeriksaan;
2. Mempercepat pengusulan DSPP dengan memilih WP yang potensial dan tidak berulang diperiksa atas WP yang sama;
3. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan.

**IKU Tingkat Efektivitas Penagihan (7b-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	50,61%	36,63%	36,63%	45,58%	45,58%	86,7%	86,7%
Capaian	120%	120%	120%	101,28%	101,28%	115,6%	115,6%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan Tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c) Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

d) Realisasi IKU

No	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
1)	Variabel tindakan penagihan	103,65%	50%	51,82%
2)	Variabel tindak lanjut DSPC	88,00%	20%	17,60%
3)	Variabel pencairan DSPC	57,61%	30%	17,28%
Total				<b>86,71%</b>

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	117,43%	71,48%	86,70%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	86,70%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	86,70%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu permintaan bantuan kepada Bidang P2IP untuk pengumpulan bahan pembuatan *profiling* dan *asset tracing*.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menelusuri nomor telepon aktif dari Wajib Pajak/ penanggung pajak untuk melakukan koordinasi;
2. Pemblokiran rekening WP;
3. Koordinasi dengan pemerintah setempat.

**IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. b) Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d) Realisasi IKU

No. (a)	Nama Wajib Pajak (b)	NPWP (c)	Dasar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan) (d)	No ND penyampaian usul (e)	Tanggal usul (f)	No BA Penelaahan (g)	Tanggal BA Penelaahan (h)
1	PT PERWIRA FAJAR BTARI	74.768.505.5-112.000	Pengawasan	ND-1264/KPP.0104/2024 ND-1279/KPP.0104/2024	05 November 2024 05 November 2024	BA-75/USULBP/WPJ.014/2024	22 November 2024

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu:

1. Menerbitkan surat himbauan (SP2DK dan Imbauan) atas potensi di luar tahun pajak

- berjalan baik melalui DPP kolaboratif maupun mandatori;
2. Memastikan administrasi penggalian potensi sejak awal sudah terpenuhi (penerbitan Surat Teguran, STP, SP2DK, dll);
  3. Meneliti dari SP2DK yang tidak direspon oleh WP yang memenuhi syarat adanya tindak pidana atau yang sedang dalam pemeriksaan untuk diusulkan buper.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Meneliti kembali kepatuhan WP, khususnya yang mempunyai potensi yang besar (penyumbang penerimaan terbesar) untuk diusulkan buper.

### **IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- b) Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan.

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

c) Formula IKU

$50\% \times \text{Capaian Laporan Pengamatan} + 50\% \times \text{Capaian Data Potensi Perpajakan}$
--

d) Realisasi IKU

**1. Laporan Pengamatan**

	Realisasi	Faktor Jangka Waktu
Pengawasan II	1	1,1
Pengawasan III	1	1,1
Pengawasan IV	1	1,1
Pengawasan V	1	1,1
Pengawasan VI	1	1,1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5,5</b>

Target : 4  
 Realisasi : 5 x 1.1  
 Capaian : 120,00%

**Ranking KPP**

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	228.23 %	120.00 %
2	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	173.07 %	120.00 %
3	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	157.22 %	120.00 %
4	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	143.45 %	120.00 %
5	111. PRATAMA MEDAN BARAT	139.93 %	120.00 %
6	119. PRATAMA BINJAI	138.08 %	120.00 %
7	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	130.92 %	120.00 %
8	123. MADYA MEDAN	125.71 %	120.00 %
9	129. MADYA DUA MEDAN	97.38 %	97.38 %
10	020. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	0.00 %	0.00 %
Total		155.93 %	120.00 %

Sumber: Mandor

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120%	120%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100%	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu:

1. Melakukan visit lapangan untuk memantau perkembangan wilayah dan pencarian data lapangan;

2. Penelitian data transaksi atas WP khususnya yang belum mempunyai NPWP baik melalui data ILAP maupun data internal lainnya.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
1. Melakukan visit lapangan untuk memantau perkembangan wilayah dan pencarian data lapangan;
  2. Penelitian data transaksi atas WP khususnya yang belum mempunyai NPWP baik melalui data ILAP maupun data internal lainnya;
  3. Bekerja sama dengan pihak Dukcapil/Kelurahan/Kecamatan untuk dapat mengetahui NIK calon WP.

### **IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP (8b-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	9,47%	92,93%	92,93%	100%	100%	100%	100%
Capaian	94,7%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

c) Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	
Realisasi Tahun 2024 =	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

d) Realisasi IKU

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
1	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I (DATA PROPINSI)	4	3	1	13	3	1	75,3
2	111 - KPP PRATAMA MEDAN BARAT	6	6	6	5	5	5	100
3	112 - KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	6	6	6	5	5	5	100
4	113 - KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	6	6	6	5	5	5	100
5	119 - KPP PRATAMA BINJAI	15	6	6	8	3	2	69,7
6	121 - KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	6	6	6	5	5	5	100
7	124 - KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	6	6	6	5	5	5	100
8	125 - KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	5	5	5	1	1	1	100

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	100%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi penyedia data ILAP secara intensif;
2. Pelaporan progress penghimpunan data ILAP ke Kanwil DJP secara rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan koordinasi dengan instansi penyedia data ILAP secara intensif;
2. Pelaporan progress penghimpunan data ILAP ke Kanwil DJP secara rutin;
3. Penghimpunan data ILAP sebaiknya dilakukan secara kolektif di lingkungan Kanwil DJP Sumut I.

**IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	97,34	97,34	120	120	117,18	117,18
Capaian	120	97,34	97,34	120	120	117,18	117,18

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b) Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus

memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018)

c) Formula IKU

Triwulan I s.d. III : (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV : (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

d) Realisasi IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%) \\ & ((102.92/90) \times 50\%) + ((107/80) \times 50\%) \\ & 57.175 + 60 \\ & \text{Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar } \mathbf{117.18} \end{aligned}$$

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	-	-	-	-	117,18%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100%	117,18%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	117,18%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu rencana aksi yang dibentuk telah dilaksanakan, dibuktikan dengan capaian triwulan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Mendorong seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan;
2. Melakukan monitoring capaian jam pelatihan pegawai setiap bulan;
3. Mengadakan kegiatan kebintalan di bidang ideologi, rohani, kejiwaan, dan kompetensi.

### **IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	86,83	86,83
Capaian	N/A	N/A	N/A	118%	118%	102,16%	102,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

c) Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d) Realisasi IKU

9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,83	Max	P/M	14%	33,33%	102,15
------	----------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	--------	--------

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	91,03	95,01	86,83

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	86,83

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	86,83

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu pelaksanaan survei dilakukan melalui mekanisme email blast tautan survei ke alamat email responden.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak sehingga saat pengisian survei Wajib Pajak dapat memberikan respon terbaik dan sukarela.

**IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (9c-N)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko..

c) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU

Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja				Realisasi	Target	Capaian
		Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	Manajemen Risiko			
TW IV	2024	17,5	17,5	13,88	50	98,88	90	109,87%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	98,88%

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90%	98,88%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	98,88%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja setiap triwulan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melaksanakan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

**IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	104,41	104,41	102,95	102,95	120	120
Capaian	100	104,41	104,41	102,95	102,95	120	120

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Belawan

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya..

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran..

c) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1 s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5%

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

d) Realisasi IKU

Prognosa				
Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	99.92		49.96
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100.00		50.00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	99.96
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120.00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,56%	97,62%	92,88%	98,40%	120

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu melakukan monitoring nilai-nilai IKPA secara berkala di Aplikasi OMSPAN terkait nilai Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian Output.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Memantau nilai IKPA per triwulan agar pencapaiannya sesuai dengan target.

## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN 524270

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM  
Tgl Cetak : 23/01/25 4:23 PM  
Halaman : 1  
lap\_tra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	1,151,738,303,000	973,877,047,725	(177,861,255,275)	85	948,226,601,000	985,313,184,705	(37,086,583,705)	104
1. Pajak Dalam Negeri	1,151,738,303,000	973,877,047,725	(177,861,255,275)	85	948,226,601,000	985,313,184,705	(37,086,583,705)	104
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	22,033,000	188,028,171	165,995,171	853	0	32,520,000	(32,520,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,033,000	188,028,171	165,995,171	853	0	32,520,000	(32,520,000)	0
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	1,151,760,336,000	974,065,075,896	(177,695,260,104)	85	948,226,601,000	985,345,704,705	(37,119,103,705)	104
<b>B. Belanja Negara</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	5,423,124,000	5,292,012,279	(131,111,721)	98	5,192,752,000	5,035,110,434	157,641,566	97
1. Belanja Pegawai	829,269,000	719,462,000	(109,807,000)	87	704,806,000	681,747,000	23,059,000	97
2. Belanja Barang	4,187,663,000	4,168,976,666	(18,686,334)	100	4,378,724,000	4,244,650,034	134,073,966	97
3. Belanja Modal	406,192,000	403,573,613	(2,618,387)	99	109,222,000	108,713,400	508,600	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PAJAK 04  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN 524270

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM  
Tgl Cetak : 23/01/25 4:23 PM  
Halaman : 2  
lap\_tra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0

### **C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Adapun bentuk efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan selama tahun 2024 adalah berhasil mengelola anggaran operasional secara optimal alokasi dana pada kegiatan strategis, seperti pelayanan dan edukasi perpajakan, struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib paja, serta Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, dimanfaatkan secara optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

#### **A. KESIMPULAN**

Secara umum pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2024 sudah optimal karena mampu mengamankan penerimaan kas negara di sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari capaian persentase realisasi penerimaan pajak Negara yang cukup optimal yaitu sebesar 100,07% dan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107,99%. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- a. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) perlu ditingkatkan dan dilaksanakan dari awal tahun, sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk menopang penerimaan pajak;
- b. Sosialisasi SPT Tahunan perlu dilakukan lebih awal melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan agar dapat berkontribusi positif terhadap kepatuhan dan penerimaan;
- c. Pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas dan berorientasi pada capaian output yang optimal;
- d. Peningkatan penyelesaian LHP2DK Kewilayahan;
- e. Peningkatan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kompetitif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih optimal.

#### **B. SARAN**

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai target kepatuhan diupayakan agar dapat menyusun rencana strategis untuk tercapainya target kepatuhan di triwulan I dengan dibantu pencarian data oleh seksi PKD untuk menarik data Wajib Pajak (WP) Wajib SPT Tahunan 2024 difilter dengan WP Non efektif, WP yang sudah lapor, dan WP yang sudah bayar;

- b. Untuk IKU mengenai Dinamisasi PPh 25 dapat dibuat IHT kepada Account Representative terkait Pengerjaan laporan penelitian Dinamisasi PPh 25 sehingga secepatnya dapat mengeksekusi laporan dinamisasi PPh 25;
- c. Dalam hal WP diusulkan untuk DSPP dilakukan per bulan Februari, Mei, dan Agustus dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan tersebut dua minggu sebelum jatuh tempo periode pengusulan dilakukan;
- d. Terkait Kepatuhan diharapkan dapat tercapai di triwulan III, terkait hal akan diadakan lembur maka dapat diusulkan mulai sekarang untuk membantu terkait pendanaan;
- e. Untuk indeks peyuluhan dan pelayanan agar ditingkatkan lagi dengan mencari tau indikator yang digunakan untuk penilaiannya;
- f. Perihal IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sudah dapat dilakukan perencanaan untuk menyusun rencana aksi untuk dilakukan agar dapat tercapai di akhir tahun;
- g. Kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan agar dapat direncanakan secara matang dan pandai memilih bahan baku;
- h. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan diharapkan dapat diterima seluruhnya oleh Kantor Pusat;
- i. Pelaksanaan Penyediaan Data Potensi Perpajakan atau alket diharapkan dapat selesai di semester I;
- j. Terkait IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, agar dilakukan monitoring nilai IKPA minimal per bulan terutama untuk nilai Capaian Output dan nilai Penyerapan, monitoring dan evaluasi belanja per bulan sehingga target penyerapan dapat dicapai.

## **LAMPIRAN**

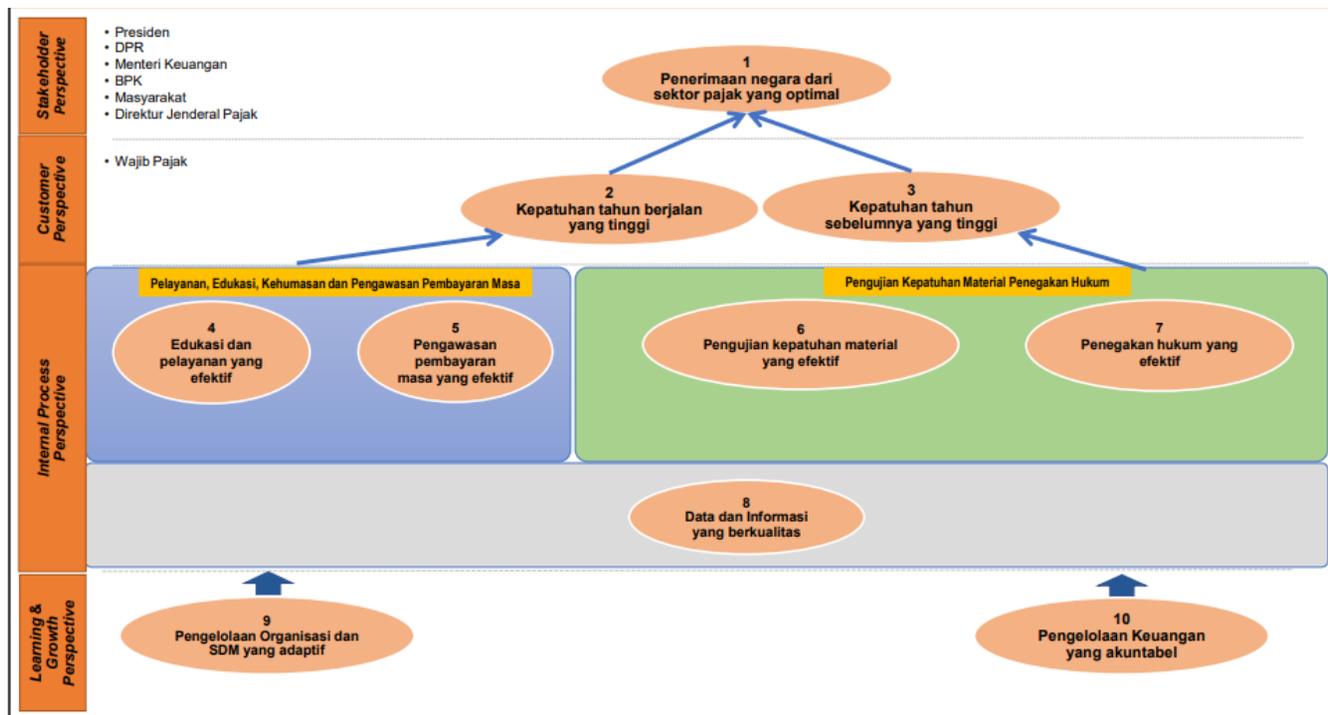
Adapun turut dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Nomor PK-4/WPJ.01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai Pendekatan Hasil Kinerja Kuantitatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri, sebagai berikut.



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK- 4/WPJ.01/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN**  
**BELAWAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA UTARA I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



# PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA

UTARA I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.094.221.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 449.120.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 256.296.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 388.805.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 3.961.296.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 3.132.027.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 829.269.000
<b>Total</b>	<b>Rp 5.055.517.000</b>

Medan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arridel Mindra

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan  
Belawan



Ditandatangani Secara Elektronik  
Priambudi Pelita Handoko



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Medan, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Medan Belawan,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Priambudi Pelita Handoko



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2024**

	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya(Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap mukadan online	Kegiatan Penyuluhan yang tepat sasaran sehingga membuat WP dapat berubahperilaku menjadi taat	<b>Q1:</b> Sosialisasi Pengisian Bukti PotongBendahara Pemerintah,kelas pajak e-filing  <b>Q2:</b> Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru  <b>Q3:</b> Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru  <b>Q4:</b> Tax Goes to Schooldan Campus	<b>Q1:</b> Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/ A1,1770 S/SS dan 1771) <b>Q2:</b> Peningkatan Ketrampilan Perpajakan <b>Q3:</b> Peningkatan Ketrampilan Perpajakan <b>Q4:</b> Peningkatandan Kesadaran Perpajakan	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan	25.974.000
2.	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap mukadan online	Kegiatan Penyuluhan yang tepat sasaran sehingga membuat WP dapat berubahperilaku	<b>Q1:</b> Sosialisasi Pengisian Bukti PotongBendahara Pemerintah,kelas	<b>Q1:</b> Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/ A1,1770 S/SS	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan	81.883.000



			menjadi taat	pajak e-filing <b>Q2:</b> Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru <b>Q3:</b> Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru <b>Q4:</b> Tax Goes to Schooldan Campus	dan 1771) <b>Q2:</b> Peningkatan Ketrampilan Perpajakan <b>Q3:</b> Peningkatan Ketrampilan Perpajakan <b>Q4:</b> Peningkatandan Kesadaran Perpajakan			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan nota hitung dan lembar hitung STP	SP2DK, Nota Penghitungan (Nothit)	<b>Q1:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan STP <b>Q2:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan STP <b>Q3:</b> Melakukan pengawasan	<b>Q1:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa. <b>Q2:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa. <b>Q3:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	0



				<p>pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkanSTP</p> <p><b>Q4:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkanSTP</p>	<p>pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p> <p><b>Q4:</b> Peningkatan kepatuhan</p>			
4.	<p>Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</p>	<p>Melakukan pengawasan kepatuhan material SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja</p>	<p>SP2DK komprehensif, kunjungan kerja</p>	<p><b>Q1:</b> Melakukan pengawasan kepatuhan material SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja</p> <p><b>Q2:</b> Melakukan pengawasan kepatuhan material SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja</p> <p><b>Q3:</b> Melakukan pengawasan kepatuhan material</p>	<p><b>Q1:</b> Peningkatan kepatuhan material pembayaran pajak</p> <p><b>Q2:</b> Peningkatan kepatuhan material pembayaran pajak</p> <p><b>Q3:</b> Peningkatan kepatuhan material pembayaran pajak</p> <p><b>Q4:</b> Peningkatan kepatuhan material pembayaran pajak</p>	<p>Januari – Desember 2024</p>	<p>Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI</p>	<p>215.551.000</p>



				SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja <b>Q4:</b> Melakukan pengawasan kepatuhan material SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja				
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan notahitung dan lembar hitung STP	SP2DK, Nota Penghitungan(Nothit)	<b>Q1:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan STP <b>Q2:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan STP <b>Q3:</b> Melakukan pengawasan	<b>Q1:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa. <b>Q2:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa. <b>Q3:</b> Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	373.574.000



				<p>pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkanSTP</p> <p><b>Q4:</b> Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkanSTP</p>	<p>belum melakukan pembayaran masa.</p> <p><b>Q4:</b> Peningkatan kepatuhan</p>			
6.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Komite Kepatuhan Wajib Pajak merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan	Rencana aksi/kegiatan dan laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan	<b>Q1-Q4:</b> Komite Kepatuhan Wajib Pajak merumuskan rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi/kegiatan yang telah dilaksanakan	Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif	Januari-Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	81.883.000
7.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Meningkatkan penggalan potensi melalui bedah WP, pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP sampai menghasilkan LHP	LHP selesai sesuai denganyang telah direncanakan	<p><b>Q1:</b> Melakukan bedahWP sampai menghasilkan LHP</p> <p><b>Q2:</b> Melakukan bedahWP sampai menghasilkan LHP</p>	<p><b>Q1:</b> Usulan Pemeriksaan,LHP</p> <p><b>Q2:</b> Usulan Pemeriksaan,LHP</p> <p><b>Q3:</b> Usulan Pemeriksaan,LHP</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasa nI, II, III, IV, V, VI, dan Seksi	67.210.000



				<p><b>Q3:</b> Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP</p> <p><b>Q4:</b> Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP</p>	<p><b>Q4:</b> Usulan Pemeriksaan, LHP</p>		<p>Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan</p>	
8.	<p>Tingkat efektivitas penagihan</p>	<p>Melaksanakan seluruh tahapan penagihan aktif terhadap penunggak pajak, Melakukan pengawasan terhadap kemampuan bayar penunggak pajak</p>	<p>Nota Dinas usul gelar perkara, berita acara gelar perkara, Usul permintaan pelaksanaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan</p>	<p><b>Q1:</b> Melakukan Inventaris WP yang akan dicegah, Membuat Profil WP / Penanggung Pajak yang akan diusul gelar perkara pencegahan, melakukangelar perkara pencegahan, mengirim usul permintaan pelaksanaan pencegahan</p>	<p><b>Q1:</b> Nota Dinas usul gelar perkara, berita acara gelar perkara, Usul permintaan pelaksanaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan</p>	<p>Januari – Desember 2024</p>	<p>Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan</p>	<p>80.070.000</p>
9.	<p>Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan</p>	<p>Menindaklanjuti IDLP (Informasi, Data, Laporan, Pengaduan) dengan cara membuat usulan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana pajak</p>	<p>Nota Dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan</p>	<p><b>Q1-Q4 :</b> Melakukan inventaris terhadap WP yang diduga melakukan tindak pidana pajak. Membuat usulan pemeriksaan bukti permulaan , dan mengirimkan usulan tersebut ke Kanwil</p>	<p><b>Q1-Q4:</b>Nota Dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan</p>	<p>Januari – Desember 2024</p>	<p>Seksi Pemeriksaan dan Penagihan</p>	<p>67.210.000</p>



				DJP Sumatera Utara I				
10.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pencarian data- data terkait WP baik internal maupun eksternal	Tersedianyadata potensi perpajakan untuk mendukung penerimaan	Q1-Q4 : Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan, merekam data potensi perpajakan pada aplikasi alket	Q1-Q4: Alat Keterangan	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	75.546.000
11.	Persentase peng himpunan data regional dari ILAP *)	Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk ditindaklanjuti	Data yang konkrit dan akurat untuk menjadi dasar penggalan penerimaan	Q1 - Q4 : Permintaan data kepada ILAP terkait	Q1 - Q4 : Surat Permintaan Data dan ND Pengiriman Data	Januari - Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0
12.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Melakukan Transfer Knowledge melalui IHT yang terjadwal baik IHT Tatap Muka dan IHT ELearning	Terpenuhinya jamlat, transfer knowlegde yang baik	Q1-Q4: Melaksanakan Kegiatan IHT yang terjadwal, Membuat jadwal e-learning untuk setiap pegawai	Q1 -Q4: Jadwal IHT, Jadwal e-learning Laporan IHT	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	58.200.000
13.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin, dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Binjai	Integritas KPP Pratama Medan Belawan terpelihara dengan baik	Q1-Q4: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik secara rutin sesuai dengan	Q1-Q4: Integritas KPP Pratama Medan Belawan terpelihara dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	58.200.000



			<p>Rencana pemantauan Tahunan tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Belawan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan Tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan</p>	<p>dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



14.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan kegiatan DKO secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna	Terciptanya Dialog kinerja yang efektif dan terukur melalui pemantauan rencana aksi	<p><b>Q1:</b> Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Januari</p> <p><b>Q2:</b> Melaksanakan DKO dan MR di Bulan April</p> <p><b>Q3:</b> Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Juli</p> <p><b>Q4:</b> Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Oktober</p>	<p><b>Q1:</b> Terlaksananya DKO dan MR yang efektif</p> <p><b>Q2:</b> Terlaksananya DKO dan MR yang efektif</p> <p><b>Q3:</b> Terlaksananya DKO dan MR yang efektif</p> <p><b>Q4:</b> Terlaksananya DKO dan MR yang efektif</p>	Januari - Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	54.000.000
15.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pengawasan penggunaan anggaran	Terciptanya penggunaan anggaran yang tepat guna, efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p><b>Q1:</b> Melakukan penyusunan RUP</p> <p><b>Q2:</b> Melakukan monitoring anggaran</p> <p><b>Q3:</b> Melakukan monitoring anggaran</p> <p><b>Q4:</b> Melakukan monitoring anggaran</p>	<p><b>Q1:</b> RUP pada akun LKPP</p> <p><b>Q2:</b> Laporan Anggaran</p> <p><b>Q3:</b> Laporan Anggaran</p> <p><b>Q4:</b> Laporan Anggaran</p>	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	80.376.000



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Priambudi Pelita Handoko	NAMA	Arridel Mindra	
NIP	196904091989121002	NIP	197008241991031005	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Priambudi Pelita Handoko  
196904091989121002



Ditandatangani secara elektronik  
Arridel Mindra  
197008241991031005



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	91 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Priambudi Pelita Handoko  
196904091989121002

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Arridel Mindra  
197008241991031005

